

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, LEVERAGE, TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Dwi Saraswati,S.Pd,M.Si  
Yunita Sari Rioni,SE,M.Si,Ak,CA**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

---

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2017. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian seluruh kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dalam laporan APBD kabupaten / kota di Sumatera Utara periode tahun 2015-2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 33 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2015-2017. Pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 93 sampel data selama 3 tahun periode pengamatan berturut-turut. Setelah data mengalami outlier sebanyak 2 data sehingga total sampel yang diteliti mengalami penurunan menjadi 91 data. Data sampel yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 20 dengan menggunakan uji asumsi klasik, Kemudian dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dan analisis uji statistik. Target Luaran dalam penelitian ini adalah jurnal ISSN. Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah publikasi ilmiah di jurnal Nasional ber ISSN. Setelah hasil diolah diharapkan ada pengaruh signifikan dari PAD, Ukuran pemerintah daerah dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.*

**Kata kunci : PAD, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Kinerja Keuangan Daerah**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan tugas roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya konkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi ini diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005. Dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah salah satu prinsip akuntansi adalah pengungkapan lengkap full disclosure, dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang berguna bagi pengguna laporan baik pada lembar muka laporan keuangan ataupun pada catatan atas laporan keuangan (CALK) (Syafitri, 2012).

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan, mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai:

1. Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan.
2. Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan.
3. Alat komunikasi dengan publik.

Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016).

Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggung jawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Junarwati et al 2013). Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari, 2016). Pemerintah daerah ataupun provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai wewenang penuh untuk meningkatkan dan memajukan wilayahnya berdasarkan pendanaan dan penghasilan dari pendapatan daerah dalam meningkatkan APBD. Kemakmuran suatu negara atau daerah ditentukan dengan besarnya nilai tambah yang tercipta berupa pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan nilai tambah yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah, infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD dan intergovernmental revenue juga menambah belanja modal pemerintah daerah tersebut (Simanullang, 2013). Halim (2013) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri. kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Ukuran pemerintah daerah bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat, akan akuntabilitas akan semakin besar sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variable dalam besar atau kecilnya pemerintah suatu daerah yang dapat diukur melalui total asset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (damanpour, 1991 dalam sari, 2016) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total asset memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran pemerintah daerah,dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Sumatera Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2015-2017.
2. Seberapa besar pengaruh Ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2015-2017.
3. Seberapa besar pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2015-2017.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2015-2017.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. LANDASAN TEORI**

#### **1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Bastian (2006: 274) mendefinisikan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Azhar (2008), menyatakan bahwa kinerja merupakan aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Hamzah (2007), menjelaskan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Hamzah, 2007). Menurut Halim (2012: 232), "Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomidaerah". Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

##### **b. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998) dalam (Sumarjo, 2010). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang (Bastian, 2006: 275).

Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyangingtyas, 2012). Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009: 121). Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya. Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) dalam Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2012: 232), menganalisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim (2012: 232-241) antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio Kemandirian
- 2) Rasio Efektivitas
- 3) Rasio Efisiensi
- 4) Rasio Aktivitas
- 5) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)<sup>19</sup>
- 6) Rasio Pertumbuhan

## 2. Size

Patrick (2007) menggunakan size sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. Penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan, besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Dalam penelitian ini proksi untuk menjelaskan size adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik. Sumarjo (2010), dalam penelitiannya memakai variabel kemakmuran dengan menggunakan proksi PAD untuk menjelaskan kemakmuran sebuah daerah. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah. Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak kepada tingkat kinerja yang lebih baik. Dengan diberlakukannya desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Halim (2012: 96-98), Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

a. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda.

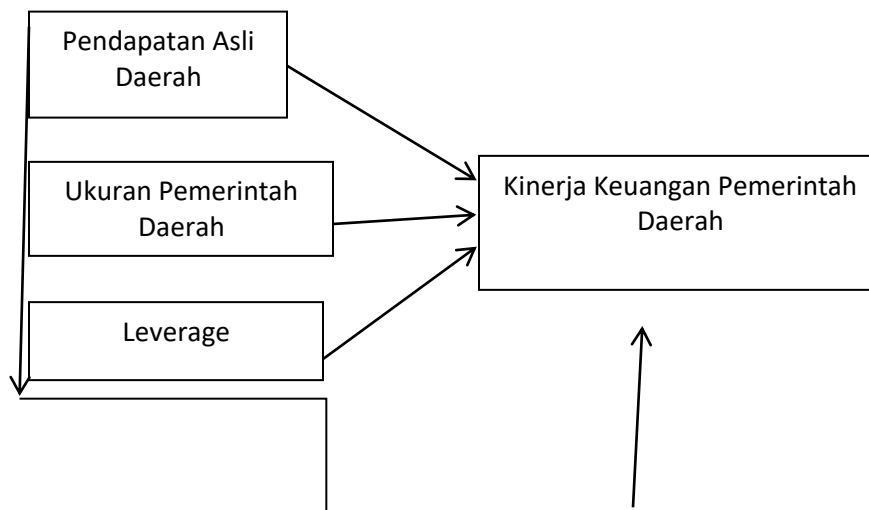
### 4. Leverage

Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. Weill (2003) mengungkapkan bahwa leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri.

## B. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut

selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono 2009: 60-61). Model dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, leverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### III. METODE PENELITIAN

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda. Tujuan dari teknik analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel terikat (Erlina, 2011:111). Untuk menguji hipotesis, digunakan Model Regresi Linier Berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- a = Konstanta
- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- $b_1, \dots, b_3$  = Koefisien regresi variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$
- $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- $X_2$  = *Size*
- $X_3$  = *Leverage*
- e = *Error* / variabel yang tidak diteliti

#### A. Defenisi Operasional Variabel

Adapun yang menjadi parameter operasional variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, menurut Halim (2012: 232) menganalisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal (Weill, 2003). Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset,

penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan sendiri (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain PAD yang sah (Halim 2012: 96-98)

## B. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 kab/kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan berdasarkan cara pengambilan sample dengan purposive sampling terdapat 31 Kab/Kota yang akan dijadikan sample dalam penelitian, dengan tahun amatan selama 3 tahun.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak lain (Muhidin dan Abdurahman, 2007: 17). Alasan menggunakan data sekunder ini yaitu dengan pertimbangan bahwa data sekunder mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dari LKPD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2017.

## D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian statistik deskriptif dan pengujian hipotesis untuk menganalisa data. Untuk menganalisa data dengan analisis regresi berganda digunakan SPSS 20. Sebagai prasarat melakukan pengujian regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian memiliki sebaran data yang normal. Terdapat empat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pengujian Statistik Deskriptif

**Tabel 3.1**

Statistik Deskriptif Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	91	0,15	1,49	0,3233	0,17625
UPD	91	1,62	28,79	3,6223	3,40305
<i>LEVERAGE</i>	91	0,00	0,08	0,0083	0,01150
KKPD	91	0,01	0,46	0,0895	0,07641

**Sumber:** data sekunder yang telah diolah

#### 2. Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Kolgomorov Smirnov (K-S). Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**

Uji Normalitas Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	1,347	0,057	Data Terdistribusi Normal

**Sumber: data sekunder yang telah diolah**

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* diperoleh sebesar 0.057, sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Glejser. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3**

VARIABEL	Sig.	KETERANGAN
PAD	0,206	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
UPD	0,461	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
<i>LEVERAGE</i>	0,627	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

**Sumber: data sekunder yang telah diolah**

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil output uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji Glejser, semua variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas, karena mempunyai nilai *sig* lebih besar dari 0,05.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut. Hasil Uji Autokorelasi:

**Tabel 3.4**

<i>Durbin-Watson</i>	Ketentuan	Kesimpulan
1,718	$-2 < DW < 2$	Tidak terjadi autokorelasi

**Sumber: data sekunder yang telah diolah**

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil output uji autokorelasi diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,718 yang berada diantara -2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian ini untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi berganda dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5**

VARIABEL	Tolerance	VIF	KETERANGAN
PAD	0,139	0,194	Tidak Terjadi Multikolinieritas
UPD	0,151	0,641	Tidak Terjadi Multikolinieritas
<i>LEVERAGE</i>	0,877	0,140	Tidak Terjadi Multikolinieritas

**Sumber: data sekunder yang telah diolah**



### 3. Pengujian Hipotesis

**Tabel 3.6**

Uji Regresi Linear Berganda Variabel	B	T	Sig	KETERANGAN
Konstanta	0,047	1,82	0,072	
PAD	0,252	2,341	0,021	H1 Diterima
UPD	-0,003	-0,598	0,551	H2 Ditolak
<i>Leverage</i>	0,034	0,051	0,959	H3 Ditolak

$$KKPD = 0,047 + 0,252 \text{ PAD} - 0,003 \text{ UPD} + 0,034 \text{ LEVERAGE} - \epsilon (6)$$

Simanullang (2013) Uji t (Uji Parsial) merupakan pengujian statistik untuk menguji regresi berganda secara individu yaitu masing-masing variabel independen terhadap variabel bebas. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7**

VARIABEL	thitung	ttabel	Sig.	KETERANGAN
PAD	2,341	1,985	0,021	H1 Diterima
UPD	-0,598	1,985	0,551	H2 Ditolak
<i>Leverage</i>	0,051	1,985	0,959	H3 Ditolak

Uji F atau uji secara bersama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji secara bersama ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**

Fhitung	Ftabel	sig
4,027	2,31	0,002

**Sumber: data sekunder yang telah diolah**

Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan hasil perhitungan dengan SPSS 20.0 diperoleh Fhitung (4,027) lebih besar dari Ftabel (2,31). Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikansi sebesar (0,002) lebih kecil dari 0,05, maka model diatas sudah tepat (*goodness of fit*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, *leverage*, secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.9**

(R <sup>2</sup> ) R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
415a	0,172	0,129	0,0713

**Sumber: data sekunder yang telah diolah**

Berdasarkan Tabel 3.9 menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adj R<sup>2</sup>) sebesar 0,129. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, *leverage*, menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah

daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 12,9% dan sisanya sebesar 87,1% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model.

## B. Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai sig sebesar (0,021) lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (2,341) lebih besar dari ttabel (1,985) maka H1 diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hal ini dapat mencerminkan bahwa pendapatan asli daerah dapat memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai sig sebesar (0,551) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (-0.598) lebih kecil dari tabel (1,985) maka H2 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa peran dari total aset belum dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* menunjukkan nilai sig sebesar (0,959) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (0,051) lebih kecil dari ttabel (1,985) maka H3 ditolak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara tidak memperhatikan tingkat utang dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut: Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,021) lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (2,341) lebih besar dari ttabel (1,985), Variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,551) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (-0.598) lebih kecil dari tabel (1,985), Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,959) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (0,051) lebih kecil dari ttabel (1,985).

### B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Bagi pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat meningkatkan dan mengembangkan kinerja keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, serta mampu mengelola leverage (utang) dengan baik sehingga akan berpengaruh terhadap semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah, Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah periode tahun pengamatan tidak hanya 3 tahun sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak

hanya menggunakan data sekunder saja, hendaknya melakukan wawancara atau konfirmasi secara langsung pada daerah yang menjadi objek penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A. dan Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah (sebuah peluang anggaran dan akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64*
- Hamzah, A. (2007). Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan : pendekatan analisis jalur (studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi jawa timur periode 2001-2006. *Naskah Publikasi. Madura: Universitas Trunojoyo*.
- Junarwati *et al.* 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2 : 186-193*.
- Kusumawardani. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
- Mardiasmo, 2007. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Muhidin, S. A dan Abdurahman M. (2007). *Analisis korelasi, regresi, dan jalur dalam penelitian*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Sari. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). Faculty of Economics Riau University. Pekanbaru. *JOM Fekon Vol 3 No 1*.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal. Volume. 1: Nomor. 1: 1-6*
- Simanullang. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012. Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. *Umrah Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1 : 1-24*
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)*. (Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Sudarmadji, A and Lana S. (2007). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). Gunadarma University. Jurnal. Vol.2. ISSN: 1858-2559*
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-delapan. Bandung: Penerbit ALFABETA
- Weill, Laurent. 2003. Leverage and corporate performance: a frontier efficiency analysis on european countries. *Working Paper. Working Paper Series. SSRN May*.